



Buletin Parlementaria

Nomor 1156/IV/VI/2021 • Juni 2021

DPR dan BPIP Pastikan Adanya Nafas Pancasila Dalam Setiap UU



3 Patuhi Protokol Kesehatan Agar Ekonomi Bisa Tumbuh



5 Perlu Sinergi Bersama Atasi Persoalan Beras



9 772614 339005



BULETIN

DPR dan BPIP Pastikan Adanya Nafas Pancasila dalam Setiap UU

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dengan semangat untuk memastikan adanya nafas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan dari Parlemen. Puan menyatakan, Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi dan identitas bangsa.

Demikian dipaparkan Puan saat berpidato pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan BPIP RI serta *talkshow* bertema 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan', di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

"Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak semata-mata ditempatkan sebagai slogan dan simbol. Sangat penting untuk memastikan agar negara menjamin bahwa Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kehidupan beragama sebagai jiwa bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara," ujar Puan.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan dalam mewujudkan Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan politik negara dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Dimana, politik negara tersebut diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari setiap

hukum di Indonesia, hukum nasional yang bercita hukum Pancasila. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juga disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Puan mengingatkan, tantangan bagi pembentuk perundang-undangan adalah bagaimana menempatkan Pancasila agar bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang *'embedded'* dalam setiap tahapan. Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila, norma-norma yang dibuat harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka, dalam prosesnya perlu dilakukan *preview* nilai-nilai Pancasila dalam setiap RUU yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah.

"Tujuannya, untuk menjamin tidak ada norma dalam setiap UU nantinya yang bertentangan dengan Pancasila. DPR berharap agar BPIP terus melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. BPIP perlu juga menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang memperkuat Pancasila. Kita harus yakin seyakini-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati semua orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Runi/nvl

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutannya menekankan sudah selayaknya lembaga/kementerian, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya mendorong pemahaman yang kuat dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemikiran dan warisan dari leluhur bangsa dapat selalu diamalkan dan dipelajari dari generasi ke generasi sehingga menjadikan nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan dapat teraktualisasikan dengan baik dalam semangat gotong royong.

Turut hadir dalam acara yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat itu antara lain Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Lalu secara *virtual*, turut hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Soetrisno, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Wisnu Bawa Tenaya, serta Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo. ■ pun/sf

Patuhi Protokol Kesehatan Agar Ekonomi Bisa Tumbuh

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini berpotensi menghambat capaian target pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2021. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk terus mengoptimalkan pergerakan ekonomi agar tetap berjalan dengan merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional sesuai rencana.

“Sehingga, target pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kuartal II 2021 dapat tercapai,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Rabu (16/6).

Hal lain yang tidak kalah penting, kata Gus Muhaimin, pemerintah harus tetap fokus pada anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. “Pemerintah juga harus mengambil langkah strategis dan taktis guna menghadapi lonjakan kasus Covid-19,” kata Gus Muhaimin yang juga Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR RI itu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk memastikan persediaan dan keamanan vaksin Covid-19, serta melakukan percepatan proses vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Gus Muhaimin juga mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan bersedia untuk menerima vaksin Covid-19. ■ sf



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Jaka/nvl



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

DPR Minta Alih Fungsi Asrama Haji Jadi Tempat Perawatan Covid-19

Angka pasien kasus Covid-19 kembali meningkat di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah rumah sakit dan tempat isolasi seperti Wisma Atlet Kemayoran mengalami lonjakan pasien dan terancam tak menampung yang bisa berdampak pasien tidak cepat tertangani.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pemerintah untuk menjadikan Asrama Haji Pondok Gede dialihfungsikan menjadi tempat isolasi dan perawatan pasien Covid 19 untuk sementara waktu. Hal ini sebagai antisipasi agar pasien Covid-19 tetap dapat ditangani.

“Saya minta kepada pemerintah agar Asrama Haji Pondok Gede dipersiapkan untuk menampung pasien Covid-19 yang tidak tertangani di rumah sakit. Mengingat tahun ini tidak ada kegiatan ibadah haji, jadi

sebaiknya dimanfaatkan untuk hal lain,” ujar Dasco dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Minggu (20/6).

Dalam pengelolaannya, lanjut Dasco, Asrama Haji nantinya dikoordinir langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Rumah Sakit Haji. “Sehingga untuk koordinasi dengan pemerintah pusat pun tetap mudah dan berjalan dengan baik,” ujar Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid 19 DPR ini.

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Dok/nvl



”

IBADAH HAJI DAN IKHTIAR MENYEMBUHKAN NYAWA MANUSIA ADALAH SAMA-SAMA IBADAH. DAN AGAMA JUGA MEMBOLEHKAN ALIH FUNGSI UNTUK SESUATU YANG DARURAT DAN BERMANFAAT

Pernyataan Dasco ini merespons pemerintah yang berencana menambah tempat isolasi bila Wisma Atlet Kemayoran dan sejumlah rumah sakit tak lagi mampu menangani pasien Covid 19. Oleh Asrama Haji Pondok Gede dinilai politisi Partai Gerindra itu dapat menjadi solusi.

“Ibadah haji dan ikhtiar menyembuhkan nyawa manusia adalah sama-sama ibadah. Dan agama juga membolehkan alih fungsi untuk sesuatu yang darurat dan bermanfaat,” tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu. ■ ann/sf

Perlu Sinergi Bersama Atasi Persoalan Beras

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

mendorong agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan beras. Jika dapat diatasi, maka kedaulatan dan ketahanan pangan nasional akan dapat terwujud. Menurut Gobel, beberapa persoalan yang acapkali terjadi mulai dari harga gabah yang anjlok saat panen, langkanya pupuk dan benih ketika memasuki musim tanam. Serta permasalahan produktivitas yang belum optimal dan wacana impor beras yang kerap menuai pro kontra.

“Untuk menyelesaikan masalah ini memang tidak bisa hanya Bulog atau Kementerian Pertanian sendiri, harus bersama-sama,” ujarnya saat pembukaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (22/6). FGD ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beserta jajarannya.

Untuk impor beras misalnya, Gobel menuturkan sebagai negara besar dengan kapasitas yang cukup, tindakan impor tersebut memalukan. Ia mendorong agar Indonesia tidak mengemis ke negara lain terkait



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (kanan) bersama Dirut Bulog Budi Waseso dan Anggota DPR RI Herman Khaeron. Foto: Rumi/rvl

kebutuhan pangan tersebut. “Makanya bicara pertanian berkaitan dengan harkat dan martabat,” ungkap Gobel.

Oleh karena itu, politisi fraksi Partai NasDem tersebut berpesan agar Bulog dapat menjalankan perannya dengan ikut serta mendorong pertanian untuk menghasilkan produk berkualitas. Ia tak menutup mata bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu integrasi kebijakan di berbagai sektor.

Maka dari itu, pemerintah tidak boleh mementingkan ego sektoral karena ketahanan pangan menyangkut kepentingan rakyat. Gobel mengimbau agar Bulog bersama pemerintah

mencari terobosan-terobosan baru. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu pun mengapresiasi Bulog yang sudah mulai melakukan pendekatan hilirisasi dalam perencanaannya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan acara FGD ini ialah upaya lembaga tersebut untuk memperoleh masukan dan pandangan dari regulator. “Kami harapkan pertemuan ini ada rekomendasi terhadap kebijakan beras yang mendukung stabilisasi secara berkesinambungan,” sebut Budi. ■ ah/sf

Komisi I Dorong Peningkatan Pengamanan Wilayah Lanud I Gusti Ngurah Rai



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI bersama Danlanud I Gusti Ngurah Rai beserta jajarannya. Foto: Hanum/nvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mendorong peningkatan pengamanan wilayah Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Bali. Menurutnya, pengamanan wilayah Lanud Ngurah Rai perlu ditingkatkan agar siap dalam mengamankan berbagai potensi ancaman yang akan datang. Pasalnya Lanud I Gusti Ngurah Rai ini menjadi salah satu pintu masuk wilayah Indonesia.

“Komisi I DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke Lanud I Gusti Ngurah Rai ini untuk melihat dari jarak dekat bagaimana kondisi Lanud ini sebenarnya. Karena Lanud I Gusti Ngurah Rai juga merupakan pintu masuk tamu-tamu yang akan datang ke Indonesia, di samping Jakarta,” jelas Kharis usai pertemuan dengan Danlanud I Gusti Ngurah

Rai beserta jajarannya di Kabupaten Badung, Bali, Senin (21/6).

Karena itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut ingin memastikan agar Lanud I Gusti Ngurah Rai bisa memberikan keamanan, khususnya dalam menjaga keamanan wisatawan asing maupun domestik yang akan berkunjung ke Bali. Namun di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa kunjungan ini juga menjadi penting karena dalam rangka Panja Alutsista TNI mengamati kondisi alutsista di Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Alutsista TNI dan Panja Kesejahteraan Prajurit. Muara dari kedua Panja tersebut adalah untuk penguatan TNI dalam mengemban tugas dan fungsi melalui ketersediaan alutsista yang ideal dan pemenuhan kesejahteraan prajurit.

Panja Alutsista Komisi I DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap pengadaan alutsista yang diajukan Kementerian Pertahanan/TNI. “Di (Lanud I Gusti Ngurah Rai) sini tidak banyak alutsistanya. Namun kita lebih memberikan masukan untuk membantu pengamanan. Setelah kita (Komisi I DPR RI) lihat, saya kira secara jumlah personel Lanud Ngurah Rai sudah mencukupi, walaupun bisa dimaksimalkan pasti akan lebih baik lagi,” jelas Kharis lebih lanjut.

Untuk itu, Kharis berharap agar peralatan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah Lanud I Gusti Ngurah Rai harus dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan guna mendukung pengamanan Bandara I Gusti Ngurah Rai maupun wilayah sekitar yang masuk dalam wilayah pengamanan Lanud I Gusti Ngurah Rai. ■ hnm/sf



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke lapas Kelas II A Tangerang. Foto: Taufan/nvl

Komisi III Optimis *Overcrowding* Lapas Dapat Diselesaikan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) di Indonesia saat ini sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan.

Permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya, masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan *overcrowding* yang dialami sebagian besar lapas di Indonesia.

“Masalah *overcrowding* di lapas Indonesia tak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami Komisi III meninjau langsung ke lapas-lapas besar yang ada untuk

melihat langsung permasalahan yang sedang terjadi,” kata Adies saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke di Lapas Kelas II A Tangerang, Banten, Kamis (17/6).

Kelebihan penghuni yang dimaksud ialah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang/kapasitas penjara maupun lapas yang tersedia. Dalam arti jumlah napi tidak sebanding dengan ketersediaan ruang lapas.

“Kelebihan penghuni itu kan akibat kesalahan penanganan setiap tahanan dari polisi, kejaksaan dan lainnya disatukan, berbagai macam masalah tindak pidana disatukan tidak

dibeda-bedakan hal ini yang menjadi masalah utama mengapa lapas ini *overcrowding*” sebut Adies.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, setiap kasus narkoba harus dipisah tidak boleh disatukan sebab terdapat golongan masyarakat pengguna narkoba yang ada mulai dari pemakai, pengedar dan bandar.

“Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa lapas itu *over* karena kasus narkoba saja digabung, harusnya dipisah karena ada pengguna yang coba-coba kemudian pengedar bahkan bandar, apalagi anak muda sekarang ini kan ada yang hanya coba-coba harusnya dibedakan,” pungkasnya. ■ tn/es

Komisi VII Dorong Industrialisasi Alumina di Mempawah



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar. Foto: Sofyan/nvi

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat senilai 800 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp13 triliun dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah tersebut dan kepentingan nasional. Sehingga seluruh potensi tambang beserta nilai tambahnya, sebesar-besarnya dapat dinikmati untuk kepentingan di dalam negeri.

Sugeng mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau proyek SGAR di Mempawah, Kalbar, Kamis (17/6). Dalam kunjungan yang didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, perwakilan Kementerian ESDM, serta direksi PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) tersebut, Komisi VII DPR RI

”

JADI SELURUH INFRASTRUKTUR NANTI AKAN MENJADI SEBUAH INTEGRASI, YANG MENJADI SEMBOYAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

mengapresiasi kehadiran proyek smelter yang dikelola oleh PT BAI, anak perusahaan BUMN PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk.

“Jadi kalau ada pelarangan, misalnya ekspor nikel, tetapi kalau bauksit ini masih diperbolehkan. Maka sebesar-besarnya harus diolah di dalam negeri. Bahkan kita sepakat tidak hanya hilirisasi dalam produk antara berupa alumina, nanti akan menjadi namanya industrialisasi. Kita ini kan sudah ada kelengkapannya, ada pelabuhan-

pelabuhan Mempawah, seperti di Kijing sana. Jadi seluruh infrastruktur nanti akan menjadi sebuah integrasi, yang menjadi semboyan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” jelas Sugeng.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, bauksit di Mempawah itu nantinya akan mengalami proses *bayer*, yakni proses pemurnian bijih bauksit menjadi alumina. Sehingga melalui konsep KEK, potensi bauksit yang besar di Mempawah ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa termasuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga ekspor. Bahkan ekspor itu tidak sekadar bahan mentah, namun ekspor dalam bentuk alumina.

Di sisi lain, Sugeng berharap keberadaan SGAR ini dapat menyerap 800 tenaga kerja lokal atau warga sekitar. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan teknikalitas, tentu dibutuhkan *upgrading* pendidikan dan kemampuan melalui *training-training* (pelatihan) tertentu. “Karena memang harus diakui operasi industri semacam ini memerlukan kemampuan yang tinggi juga,” tandas legislator dari Jawa Tengah VIII itu.

Sebelumnya, Bupati Mempawah Erlina berharap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Mempawah mampu membawa perubahan bagi peningkatan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, hingga penanggulangan kemiskinan. Termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mempawah yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. ■ sf

Komisi VII Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

"Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan *support* ini karena bisa menjadi *role model* teknologi yang sangat sederhana dan murah," kata Bambang usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (17/6).

Ia mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi *Atmospheric Leaching* sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja

dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, pada Tahun 2021 beberapa smelter nikel akan selesai pembangunannya, salah satunya adalah smelter dari PT Smelter Nikel Indonesia (PT SNI) yang hingga saat ini progresnya telah mencapai 80,13 persen.

Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap target penyelesaian beberapa proyek pembangunan smelter di dalam negeri, dikarenakan adanya sejumlah investor yang melakukan penundaan investasi.

Smelter PT SNI direncanakan akan menggunakan teknologi *hydro* metalurgi atau *smelter high pressure acid leaching* (HPAL) dengan kapasitas *input* sebesar 2,4 juta ton pertahun dan kapasitas *output* sebesar 76.500 ton per tahun dalam bentuk *mix hydroxide precipitate* (MHP) sebagai produk akhir, yang mana komponen kandungan nikel kontennya sebesar rata-rata 35 persen yang merupakan bahan baku utama baterai

listrik, baja khusus dan stainless steel.

"Kita tahu nikel kadar rendah jumlahnya banyak di dalam negeri dan merupakan bahan baku terbaik untuk memproduksi baterai lithium ion atau biasa disebut limonite. Diharapkan PT SNI mampu menyediakan bahan baku baterai guna mendorong percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri kedepannya," ujarnya.

Selain nikel kadar rendah, produk hasil ekstraksi teknologi *Atmospheric Leaching* PT SNI lainnya berupa Ferro Carbonate ($FeCo_3$) atau produk yang digunakan dalam nutrisi/suplemen hewan guna meningkatkan kualitas pakan ternak, Kieserit adalah pupuk tanaman khususnya pada perkebunan besar baik kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Selanjutnya, gypsum yang dibutuhkan dalam industri semen, keramik, industri cat dan industri farmasi. Sementara, silica (SiO_2) hasil pengelolaan dapat dimanfaatkan sebagai bata atau bahan komponen bangunan, yakni lumpur pengeboran/*mud drilling*. ■ ann/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Anne/nvl

Operasional PLTGU Muara Tawar Tak Boleh Terganggu

Sektor kelistrikan merupakan sektor yang strategis di Indonesia, kebutuhan pasokan listrik akan terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan khususnya pada sistem Jawa-Bali. Latar belakang inilah yang membuat PT PLN (Persero) membangun pembangkit listrik, salah satunya adalah PLTGU Muara Tawar.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII PT PJB PLTGU Muara Tawar Bekasi yang dipimpin oleh wakil ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin, Komisi VII menemukan kendala operasional, yang diakibatkan pembangunan pulau reklamasi di Bekasi. Alex menegaskan agar operasional PLTGU Muara Tawar jangan sampai terganggu. Untuk itu, dia mengungkapkan akan memanggil Pemda Bekasi ke DPR RI agar bisa mendiskusikan dan mencari solusi

bersama antara Komisi VII dan pemangku kepentingan.

“Ada masalah pembangunan pulau reklamasi di Bekasi, pulau P dan V. Itu akan mengganggu air laut untuk pendinginan, kita akan undang Pemda Bekasi dan juga pihak yang terkait, kita undang ke Senayan,” papar Alex usai memimpin peninjauan PLTGU Muara Tawar, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/6).

Dalam kesempatan ini, Komisi VII juga meninjau secara langsung operasional PLTGU Muara Tawar dan melihat lebih dekat jaminan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Muara Tawar. Selain itu, Komisi VII juga meminta penjelasan terkait proses pengangkutan gas ke lokasi PLTGU Muara Tawar, dan penjelasan harga jual gas ke PLTGU Muara Tawar hingga informasi kendala dan dukungan yang diperlukan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi VII juga menjaring aspirasi mitra terkait dan mendorong adanya sinergi di antara mitra-mitra tersebut untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam memaksimalkan potensi PLTGU Muara Tawar ini. PLTGU Jawa I Muara Tawar yang berlokasi di Kabupaten Bekasi ini merupakan salah satu bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kapasitas PLTGU Muara Tawar diketahui mencapai 1600 MegaWatt (MW). Pembangkit listrik Muara Tawar merupakan pemasok listrik saat beban puncak atau peaker ke dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Diketahui pasokan gas PLTGU Muara Tawar saat ini berasal dari PT PGN (Persero) dengan penyerapan lebih dari 200 BBTUD (Billion British Thermal Unit Per Day). ■eko/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT PJB PLTGU Muara Tawar. Foto: Eko/nvl



Kasus Covid-19 Meningkat, Komisi IX Dukung Pemerintah Percepat Vaksinasi di Jambi

“Presiden telah menginstruksikan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan target 1 juta vaksinasi setiap hari mulai bulan Juli. Tentunya kami (Komisi IX DPR RI) mendukung instruksi ini walaupun percepatan vaksinasi sangat dipengaruhi oleh suplai dan distribusi vaksin,” terang politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni menyampaikan bahwa Jambi telah melakukan gerakan serempak sepekan vaksinasi se-Provinsi Jambi yang menurut data cepat telah memperoleh kemajuan 8,44 persen kenaikan vaksinasi untuk khusus

lansia. Menurutnya, ini salah satu upaya yang sangat spektakuler karena baru Jambi yang melakukannya secara serempak seluruh kabupaten kota.

“Kami laporkan bahwa kita *launching* untuk vaksinasi lansia di Provinsi Jambi sejak tanggal 14 Januari sampai dengan 7 Juni 2021, itu sasaran kita baru 7,6 persen selama 5 bulan. Tetapi, kemudian kita serempak seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi *launching* di dua tempat, yaitu

di Kota Jambi dan di Muaro Bungo. Alhamdulillah dalam waktu tujuh hari mengalami kenaikan (persentase vaksinasi), jelasnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi ini turut dihadiri sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI lain di antaranya, Muchamad Nabil Haroen dan dan Edy Wuryanto dari F-PDI Perjuangan, Delia Pratiwi Sitepu (F-Golkar), H.A.R. Sutan Adil Hendra dan Ruskati Ali Baal dari F-Gerindra, Nurhadi (F-NasDem), Nur Yasin (F-PKB), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), serta Alifuddin (F- PKS). ■ ais/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan mitra kerja terkait. Foto: Aisyah/nvl

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esthelita Runtuwene menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021. Ia mengatakan hal ini menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat agar lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Adanya varian Delta dari India yang disinyalir menjadi faktor kasus Covid-19, dan pelonjakan 302 persen kasus di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, juga turut menjadi pengingat bagi Pemerintah

Provinsi Jambi agar kejadian yang sama tidak terjadi di Jambi.

Hal tersebut disampaikan Felly dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Jambi, serta seluruh *stakeholder* di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/6). Ia menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pandemi selain melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Wujudkan *Herd Immunity*, Komisi IX Dorong Program Vaksinasi Covid-19 di Riau

Lonjakan kasus baru dan tingkat kematian kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Beberapa upaya pengendalian telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah vaksinasi. Untuk mempercepat vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong program vaksinasi Covid-19 khususnya di Provinsi Riau agar berjalan lebih cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Provinsi Riau saat ini masih menjalankan program vaksinasi prioritas bagi kalangan lansia, tetapi realisasinya masih rendah (6,7 persen dari total target). Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin Covid-19 lebih banyak ke Provinsi Riau, dengan harapan *herd immunity* atau kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan penularan Covid-19 dapat ditekan,” jelas Melki dalam sambutannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Kamis (17/6).

Mengingat realisasi program vaksinasi prioritas di Provinsi Riau bagi kalangan lansia masih tergolong rendah, Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia. “Dari sekitar 964.000 target program vaksinasi lansia dan pelayanan publik di provinsi Riau, vaksinasi bagi kalangan lansia inilah yang perlu menjadi perhatian, pasalnya hanya mencapai 6,7 persen dari target 600.000 penerima

vaksin dari kelompok lansia di Riau,” ungkap Melki.

Meskipun Riau yang memperoleh peringkat tiga besar penyebaran Covid-19, Melki turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan upaya tracing atau melacak orang yang terpapar virus, dengan melakukan tracing terhadap 15 orang dalam setiap kasus satu orang terkonfirmasi positif sebagai upaya untuk memaksimalkan pelacakan.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan capaian vaksinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. “Capaian vaksinasi di Provinsi Riau per kabupaten/kota pada saat ini dari Sinovac sebanyak 895.680 sedangkan total sasaran vaksin sebanyak 964.846 dengan SDM kesehatan sebanyak 32.923, petugas publik 349.418, dan lansia 582.505. Masih ada beberapa vaksin di daerah yang belum berjalan karena ada di beberapa

daerah yang masih sedikit vaksinnya,” jelas Syamsuar.

Dirinya menuturkan, saat ini perkembangan angka kasus Covid-19 di Riau pada per 16 Juni 2021 jumlah kasus konfirmasi positif tercatat 66.520, sembuh mencapai 92 persen, meninggal 1.791, kasus aktif sebanyak 3.507, dirawat di RS sebanyak 565 orang dan dengan isolasi mandiri 2.942 orang. “Riau menargetkan peningkatan vaksinasi masal hingga 1 juta orang dan tentunya kami sangat berharap dukungan dari Kemenkes RI untuk menambah vaksin lagi ke Provinsi Riau ini,” tandasnya. ■ tra/es



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Tiara/nvl

Komisi IX Gali Informasi atas Rendahnya Capaian Vaksinasi di Sumbar

Dalam kesempatan itu beberapa anggota Komisi IX DPR RI dapil Sumbar seperti Ade Rezki Pratama, Darul Sika, dan Suir Syam menduga, rendahnya capaian vaksinasi di Provinsi Sumbar karena kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat vaksin.

Bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena adanya kesalahan informasi yang beredar tentang vaksin. Misalnya, terkait kehalalan vaksin serta efek samping yang timbul akibat vaksin. “Jangan sampai informasi yang belum tentu benar, menjadi sebuah *miss understanding*, sehingga masyarakat enggan untuk menerima vaksin,” ungkap Ade Rezki Pratama.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat beserta jajarannya. Foto: Ayu/nvl

Capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama per 13 Juni 2021, diketahui Provinsi Sumatera Barat berada di posisi terendah secara nasional, serta terendah ke-4 dalam vaksinasi dosis ke dua. Sementara hingga hari ini, Sumbar masih dalam status zona orange, dengan angka penderita positif Covid-19 sekitar 48.441 orang. Bahkan pada pekan sebelumnya, Kabupaten Padang Pariaman masuk dalam zona merah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar

kepada **Parlementaria** berdasarkan paparan Satgas Covid-19 saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sumbar beserta jajarannya, Satgas Covid-19, Perwakilan Kementerian Kesehatan, BPOM, di Padang, Sumatera Barat, Jumat (18/6).

“Kami (Komisi IX DPR RI) sengaja melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terhadap proses penanganan pandemi Covid-19 secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Termasuk untuk mengetahui penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Sumbar,” jelas Ansory.

Dari data dan informasi yang terhimpun, nantinya Komisi IX DPR RI bersama-sama dengan pemerintah pusat akan membahas hal tersebut guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Sehingga angka vaksinasi di Sumbar dapat meningkat, dan angka penderita Covid-19 di Sumbar pun dapat menurun.

Dalam kunjungan tersebut, hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI lainnya yakni Sri Meliyana (F-Gerindra), Linda Megawati dan Lucy Kurniasari dari F-Demokrat, Adang Sudrajat (F-PPK), serta Anas Thahir (F-PPP). ■ ayu/es

Kampus Merdeka Belum Sepenuhnya Menjawab Permasalahan Pendidikan Tinggi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Kampus Merdeka dari pemerintah dianggap belum sepenuhnya menjawab masalah dunia pendidikan yang meliputi otomatisasi pembaharuan akreditasi, hak belajar tiga semester di luar prodi, otonomi pembukaan prodi baru pada PTN dan PTS serta kemudahan persyaratan menjadi PTN BH.

Dirinya mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meninjau ulang makna Kampus Merdeka, terutama ketika dihadapkan dengan makna otonomi kampus sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dimana, penerapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka membutuhkan perubahan paradigma dari sivitas akademika, sehingga tidak semua kampus dapat mengimplementasikan kebijakan ini.

“Kebijakan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. Pengelolaan Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi di masa pandemi. Serta kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terhadap substansi otonomi perguruan tinggi dan Tridharma sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menjadi fokus diskusi hari ini,” urai Fikri di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6).

Dalam pertemuan dengan jajaran sivitas akademika Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), perwakilan BEM dan mahasiswa penerima beasiswa tersebut,

Fikri menjelaskan kebijakan tersebut belum menjawab skema revitalisasi perguruan tinggi LPTK dan terkesan tidak sinergi dengan program Guru Penggerak.

Sementara itu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP Budi Setiyono mengatakan agar kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak terlalu kaku pada prosedur, sehingga esensi persoalan sendiri justru malah terabaikan.

“Analogi sederhananya seperti dalam sebuah *project*, ketika evaluasi justru yang lebih banyak dipertanyakan pemerintah (Kemendikbudristek) justru masalah kelengkapan dokumen bukan fokus pada hasil capaian dari *project* tersebut,” papar Budi.

Ia menambahkan, salah satu kesulitannya pada masa transisi di tengah pandemi ini memerlukan waktu agar mahasiswa lebih adaptif dengan program Kampus Merdeka ini. ■ oji/es



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Oji/nvi

Program Merdeka Belajar Masih Banyak Kekurangan

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai program pemerintah berupa Merdeka Belajar, termasuk Kampus Merdeka masih memiliki banyak kekurangan. Dari mulai konsep sampai dasar hukumnya ternyata belum tersampaikan secara komprehensif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada Komisi X DPR RI.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan program menuju SDM Unggul yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Saat berbicara di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Jawa Barat, Jumat (18/6), Ferdiansyah mengungkapkan Komisi X DPR RI belum menerima konsep berupa tulisan atau kajian akademis

tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

“Setelah kita cermati dari berbagai masukan pada diskusi di IPB, dapat disimpulkan memang apa yang kami khawatirkan untuk mendukung program Pak Presiden mengenai SDM Unggul dalam kaitan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, nampaknya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, guna mendorong atau mendukung program Pak Jokowi tersebut ada beberapa hal yang memang harus dilakukan,” kata Ferdiansyah.

Pada awal program ini diberlakukan Desember 2019, sebut Ferdiansyah, pihaknya belum menerima dasar hukumnya. Dasar hukum baru muncul setelah program ini berjalan setahun. Dasar hukum yang dimaksud adalah Peraturan Mendikbud (Permendikbud)



MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA MERUPAKAN PROGRAM MENUJU SDM UNGGUL YANG DICANANGKAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024. Dalam Permendikbud itu dituangkan soal Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Kebijakan ini, lanjut Ferdiansyah, untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. “Sampai saat ini Komisi X memang belum menerima konsep utuh Merdeka Belajar secara umum maupun kebijakan Kampus Merdeka secara khusus. Bahan yang kami terima selama ini dalam bentuk *power point*, sehingga kami belum bisa membaca secara komprehensif mengenai konsep besarnya termasuk landasan hukumnya,” urai politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ditegaskan kembali oleh Ferdiansyah bahwa konteks program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah menciptakan SDM unggul yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan kunjungan Komisi X ke IPB ini, kata legislator asal Jawa Barat XI tersebut, untuk mendapat masukan dan pandangan kritis dari para akademisi kampus soal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. ■ azk/sf



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Azka/jk

Baleg Apresiasi Perda Pengaturan Minuman Beralkohol di Jatim

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah membentuk peraturan terkait pengaturan minuman beralkohol. Regulasi itu di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Aturan ini menjadi masukan bagi Baleg DPR RI yang kini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

”

UU INI SEYOGYANYA MEMANG HARUS KOOPERATIF DAN ATURAN HUKUM TIDAK BOLEH DISKRIMINATIF, HARUS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA SEMUA WARGA

“Dengan begitu (Perda tersebut) diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi Baleg dalam menyusun RUU Larangan Minuman Beralkohol,” Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam menyerap informasi dan masukan terkait perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU Larangan Minuman Beralkohol, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (15/6).

Ibnu menambahkan, pihaknya melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukum, serta mendapatkan penyempurnaan pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol sesuai kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan dalam pertemuan tersebut cukup banyak masukan yang diterima Baleg, sehingga tercipta diskusi yang menarik. “Secara garis besar (masukan) itu kira-kira judulnya jangan larangan *lah*, tetapi pengaturan minuman beralkohol. Itu kita akan bahas, akan kita satukan di Baleg, karena RUU Prolegnas Prioritas yang terdaftar adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol,” tandas Ibnu.

Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini untuk mempertegas aspek penegakan hukum. Ia berharap nantinya dengan adanya regulasi terkait minuman beralkohol ini, dapat menjadi acuan bagi masyarakat.

“Oleh karena itu dalam UU ini seyogyanya memang harus kooperatif dan aturan hukum tidak boleh diskriminatif, harus memberikan perlindungan kepada semua warga, apalagi Indonesia inikan beraneka ragam Budaya,” ucap politisi Partai Golkar dalam pertemuan itu. ■ **opi/sf**



Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Jatim. Foto: Geraldi/jk

BAKN: Alokasi DAK Ada yang Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami (BAKN) mendatangi IPB dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak

berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujar Wahyu usai pertemuan dengan Rektor dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jabar, Selasa (15/6).

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan. Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan, di mana secara spesifik atau secara khusus daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.

Sehingga banyak rencana program-

”

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN IPB TERKAIT DAK, KHUSUSNYA DAK DAERAH KEPULAUAN ITU TERNYATA SAMA DENGAN APA YANG DITEMUKAN BAKN DI LAPANGAN

program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat telaah terkait DAK tersebut yang kemudian akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasannya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

■ ayu/es



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Tari/jk

Diplomasi DPR Dapat Jembatani Potensi Ekonomi Banten dengan Pasar Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali

Sera mengatakan, diplomasi DPR yang diinisiasi oleh BKSAP berpotensi dapat menjembatani antara potensi ekonomi Banten dan pasar kawasan atau global. Yakni, dengan memanfaatkan beragam forum multilateral parlemen untuk memperkenalkan potensi ekonomi Provinsi Banten.

Hal tersebut diungkapkan Mardani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BKSAP dengan jajaran Pemerintah Provinsi Banten serta *civitas academica* di Kota Serang, Banten, Jumat (11/6). Ia mengatakan diplomasi BKSAP dapat dioptimalkan dengan menginisiasi dan mendorong berbagai forum parlemen untuk mengadopsi kesepakatan-kesepakatan bersama dalam kerangka memajukan perekonomian daerah.

“Menurut saya, potensi Provinsi Banten ini sangat luar biasa. Apalagi wilayahnya juga menempel dengan Ibu Kota dan menjadi pintu gerbang dari Sumatra. Untuk itu, potensi-potensi seperti wisata religius, wisata alam dan kuliner ini cukup potensial, cuma memang kita harus lebih menyambungkan antara potensi Provinsi Banten dengan pemerintah pusat maupun ke negara-negara lain. Nah, inilah yang juga menjadi tugas dari BKSAP secara informal hampir seluruh perwakilan Komisi ada,” imbuh Mardani.

”

POTENSI PROVINSI BANTEN INI SANGAT LUAR BIASA. APALAGI WILAYAHNYA JUGA MENEMPEL DENGAN IBU KOTA DAN MENJADI PINTU GERBANG DARI SUMATRA. UNTUK ITU, POTENSI-POTENSI SEPERTI WISATA RELIGIUS, WISATA ALAM DAN KULINER INI CUKUP POTENSIAL

Wakil Ketua
BKSAP DPR RI
Mardani Ali Sera.
Foto: Jaka/jk



Politisi F-PKS ini menuturkan, BKSAP saat ini memiliki 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Ini bermakna, ada 102 negara yang direncanakan akan dikunjungi delegasi DPR. Pemprov Banten dapat bersinergi dengan 102 GKSB dalam kerangka ekspansi produk Banten ke pasar mancanegara. Selain itu, BKSAP juga memiliki mekanisme ‘Diplomasi Individu’ dimana 575 Anggota DPR dapat melakukan misi diplomasi secara mandiri.

“Dengan demikian, diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP bisa disinergikan dengan pemerintah daerah dalam kerangka memajukan potensi ekonomi daerah. Selain itu, Provinsi Banten juga dapat memanfaatkan 22 Anggota dari dapil Banten saat mereka melakukan Diplomasi Individu ke luar negeri. Ditambah dengan kunjungan teknis Pimpinan BKSAP ke negara-negara lain untuk tujuan tertentu,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I

ini. ■jk/es

Putu Supadma Dukung Penguatan Manajemen Rantai Pasok dan Konektivitas Perdagangan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan, untuk memperkuat ketangguhan rantai pasok dan meningkatkan konektivitas perdagangan di berbagai sektor, saat ini Indonesia sudah memiliki sistem logistik terpadu yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang.

Hal ini disampaikan Putu dalam presentasinya pada Sidang ke-12 AIPA Caucus yang digelar secara daring dari Parlemen Singapura, Rabu (16/6). Dimana, Putu menyampaikan *country report* tentang ketahanan rantai pasok dan peningkatan konektivitas perdagangan.

“Salah satu panduannya, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Di bawah Perpres ini pengembangan sistem logistik nasional berusaha memfasilitasi aliran yang lancar, memastikan persediaan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan daya saing dari tingkat lokal hingga global,” kata Putu.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini melanjutkan, implementasi cetak biru pengembangan sistem logistik nasional dibagi menjadi tiga fase. Dimana, pada fase kedua difokuskan pada integrasi jaringan logistik regional ASEAN dan mengintegrasikan dengan jaringan logistik global.

“Sebagai bagian dari proses integrasi dengan jaringan logistik



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Ria/jk

regional serta global, kami sedang menyusun ekosistem yang bisa mensinkronkan barang-barang ekspor dan impor dari titik tiba sampai ke gudang. Jadi ini merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang berorientasi melakukan penyederhanaan proses, memastikan penggunaan efisiensi terkait informasi, komunikasi dan teknologi digital,” terangnya.

Selain diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2012, ketahanan rantai pasok dan peningkatan konektivitas perdagangan juga diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian, kata politisi dapil Bali itu, guna memperkuat komitmen tentang integrasi ekonomi, Indonesia juga mengadopsi Hanoi Plan Of Action untuk memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN dan konektivitas rantai pasok dalam menangani pandemi Covid-19 dan juga rangka pemulihan ekonomi ASEAN, serta melakukan penandatanganan pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Hal itu merupakan komitmen Indonesia dalam mewujudkan konektivitas yang efektif dan efisien baik dalam perdagangan maupun transportasi dalam skala yang lebih besar. “Ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat dan memperluas rantai pasok di kawasan,” kata Putu dalam sidang tersebut. ■ nm/es

Forum Komunikasi dan Sosialisasi Perkuat Sinergi DPR - Wartawan

FORUM KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KINERJA DPR RI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI SERTA SETJEN DENGAN KOORDINATORIAT WARTAWAN PARLEMEN DPR RI

“PERAN DPR RI DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI”

TANGERANG, BANTEN
18 - 20 Juni 2021



Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat menyampaikan sambutan dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Tangerang, Banten. Foto: Jaka/jk

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI sebagai wadah silaturahmi yang mempertemukan pimpinan DPR RI, Anggota DPR, Sekretariat Jenderal (Setjen DPR) serta wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

“Tujuannya agar ada sinergitas antara wakil rakyat dan wartawan

parlemen. Juga silaturahmi antara pimpinan, anggota DPR RI, serta lingkungan Setjen dan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen,” ujar Indra dalam sambutannya di acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Jumat (18/6).

Indra berharap, forum ini dapat menyokong peran DPR dalam mengupayakan pemulihan ekonomi

saat pandemi yang menjadi tema besar acara tersebut.

“Diskusi ini akan memperluas pandangan terhadap peran DPR dalam pemulihan ekonomi di saat pandemi. Diharapkan wartawan dapat menyajikan informasi yang komprehensif,” sebut Indra. Sebab, Indra menilai wartawan juga telah mengetahui kinerja anggota dewan lewat kegiatan dan rapatnya yang dapat diliput.

Menurut Indra, DPR tetap turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu kehadiran media yang mempublikasikan informasi ke masyarakat berperan penting dalam menjawab keingintahuan masyarakat soal penanganan Covid-19 dan upaya DPR RI dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Adapun selama pandemi ini, Indra menerangkan bahwa Setjen DPR RI sebagai *supporting system* bagi Anggota DPR RI tetap mengupayakan pelaksanaan tiga fungsi DPR RI tetap berjalan. Di mana DPR tetap melakukan kegiatan rapat bersama pemerintah secara fisik maupun virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Marlen Ericson Sitompul menyebutkan, forum komunikasi dan sosialisasi ini menjadi sarana bagi penyampaian kinerja DPR kepada media. “Terutama peran DPR dalam upayanya memulihkan ekonomi selama pandemi Covid-19,” ucapnya.

Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan menghadirkan narasumber Anggota Komisi VI DPR RI ST. Ananta Wahana dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Turut Hadir Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul serta Plt. Biro Pemberitaan Parlemen Muhammad Djazuli. ■ ah/es

'SI MANIS', Upaya Setjen DPR Kelola Risiko yang Terintegrasi

Organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam setiap aktivitasnya memiliki risiko yang tidak kecil. Tidak hanya risiko teknis tetapi risiko politik yang berubah begitu cepat yang dampaknya memiliki risiko yang perlu dikelola agar tidak mengganggu pencapaian suatu organisasi.

"Risiko menjadi bagian penting yang harus dikelola agar tidak mengganggu pencapaian suatu organisasi. Oleh karenanya hari ini kami *me-launching* Sistem Manajemen Risiko Instansi (SI MANIS) yang telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021," ungkap Inspektur Utama Setyanta Nugraha saat *launching* SI MANIS, di Jakarta, Jumat (18/6)

Totok, sapaan akrabnya, menerangkan, SI MANIS merupakan inovasi dalam rangka menemukan risiko yang dihadapi di lingkungan Setjen DPR. Menurutnya, dengan mengenali risiko, mengidentifikasi dan melakukan pengisian register risiko di aplikasi SI MANIS dapat mengurangi kerugian yang signifikan bagi pencapaian suatu organisasi.

"Sebelumnya manajemen risiko sudah ada dan diatur dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2018. Namun, pengisian register risiko, laporan pelaksanaan penanganan risiko dan laporan monitoring pengawasan risiko belum didukung dengan aplikasi masih dilakukan secara manual," ungkapnya.

Pelaksanaan risiko, lanjut Totok juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 yang mengharuskan pengarusutamaan dari tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui penerapan manajemen risiko di seluruh kementerian dan lembaga.



Inspektur Utama Setyanta Nugraha melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan institute Internal Auditors Indonesia (IIA). Foto: Runli/jk

"Semua unit eselon II perlu memiliki sadar risiko serta memiliki komitmen mengenali risiko sekaligus melakukan mitigasi risiko melalui SI MANIS. Sehingga hadirnya SI MANIS tidak hanya sebagai produk akademi tetapi sebagai kebutuhan untuk bisa mengatasi permasalahan manajemen risiko di Setjen DPR," jelas Totok.

Selain sosialisasi SI MANIS, juga digelar Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Setjen DPR RI dengan institute Internal Auditors Indonesia (IIA) yang dihadiri langsung oleh Presiden IIA Indonesia Angela Indirawati Simatupang

"Besar harapan kami kerja sama dengan IIA Indonesia akan menghasilkan ahli-ahli manajemen risiko yang handal yang mampu memberikan kontribusi optimal guna tata kelola yang baik menuju *good government* dan *clean government*," ungkap Totok.

Di tempat yang sama, Inspektur II Furcony Putri Syakura menyampaikan SI MANIS bertujuan untuk menjadi

pedoman dalam rangka melakukan *early warning* terhadap suatu risiko pekerjaan. "SI MANIS hadir untuk pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Setjen DPR lebih mudah, efektif, efisien dan terintegrasi," ujarnya.

Adapun, target jangka panjang dari SI MANIS adalah melahirkan penerapan budaya sadar risiko. "Untuk diketahui, penerapan manajemen risiko menggunakan aplikasi baru dilakukan oleh Setjen DPR. Untuk itu kegiatan hari ini diharapkan menjadi *role model* bagi rumpun Inspektorat parlemen serta Sekretariat DPRD di seluruh Indonesia dalam mengelola manajemen risiko untuk pencapaian tujuan suatu organisasi," lanjutnya.

Dalam kegiatan itu juga terdapat penyampaian dukungan oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Tri Handoyo, Penyampaian Dukungan SI MANIS oleh Dr. Winantuningtyastiti, Penyampaian Dukungan oleh Ketua PKN II Angkatan III Tahun 2021 Dr. Drs. Mulyadin Malik ■ rnm/es

BURT Minta Pelayanan RS Primaya Makassar Lebih Ditingkatkan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Bakri mengapresiasi pelayanan Rumah Sakit (RS) Primaya Makassar terhadap pasien, utamanya kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Ia berharap layanan di RS *Provider* PT Asuransi Jasindo ini terus ditingkatkan terutama dalam hal kecepatan.

“Kami sudah berdiskusi panjang lebar bersama kawan-kawan Jasindo

dan jajaran direksi RS Primaya, kami memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan salah satunya adalah pelayanan terhadap Anggota DPR RI lebih cepat dan sigap,” ujar Bakri usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan jajaran direksi RS Primaya yang juga dihadiri oleh perwakilan PT Jasindo di Makassar, Sulsel, Sabtu (19/6).

Bakri mengingatkan bahwa pelayanan harus dilakukan secara maksimal terlebih di Indonesia saat ini sedang ada sebaran Covid-19 varian baru. Walaupun Makassar bukan lagi masuk zona merah, tapi tetap harus disiplin 5M untuk pencegahan.

“Kita juga minta pelayanan kepada masyarakat Makassar

Wakil Ketua BURT DPR RI
Bakri. Foto: Mentari/jk

”

PELAYANAN HARUS DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL TERLEBIH DI INDONESIA SAAT INI SEDANG ADA SEBARAN COVID-19 VARIAN BARU. WALAUPUN MAKASSAR BUKAN LAGI MASUK ZONA MERAH, TAPI TETAP HARUS DISIPLIN 5M UNTUK PENCEGAHAN

ini harus maksimal juga. Saya dengar di Makassar ini sudah bukan zona merah, tapi tetap perlu berhati-hati, tetap disiplin 5M karna masih banyak sebaran virus apalagi banyak varian baru ini,” ujar Bakri.

Politisi Fraksi PAN ini menambahkan, Makassar merupakan daerah transit, tidak menutup kemungkinan Anggota DPR RI dari wilayah Indonesia timur lainnya yang sedang transit dalam perjalanan kelelahan ini juga harus dilayani dengan cepat.

“Makassar ini daerah transit jadi tentu berbeda dengan provinsi-provinsi lain, kemungkinan besar bukan hanya anggota DPR RI yang berdomisili di sini, tidak menutup kemungkinan kawan-kawan dari Maluku dan Papua dari Indonesia timur lainnya yang transit di sini dan harus dilayani dengan baik,” harap Bakri. ■ mri/es



Pelayanan Administrasi di RS Medimas Cirebon Harus Cepat dan Ramah

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) di Rumah Sakit Umum Medimas, Kota Cirebon, Jawa Barat, terlaksana dengan baik. Untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meminta agar pelayanan administrasi lebih diperbaiki agar masyarakat merasa nyaman.

“Menurutnya, salah satu hal terpenting dalam pelayanan kesehatan adalah proses administrasi yang cepat dan tidak menyulitkan

pasien juga pelayanan yang ramah tentu hal ini akan membuat pasien nyaman,” ungkapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan manajemen RS Medimas Cirebon serta dihadiri oleh perwakilan PT Jasindo, di Cirebon, Jawa Barat, Selasa, (15/6)

Agung melanjutkan, dari beberapa fakta di lapangan, ada beberapa RS yang lambat dalam segi administrasi dan kurang ramah. Ia meminta agar setiap RS yang bekerjasama dengan PT Jasindo, untuk membenahi permasalahan proses pelayanan administrasi di RS yang lamban dan

kurang ramah, supaya pasien yang berobat ke RS tersebut bisa nyaman dan tentunya kalo sudah nyaman tingkat kesembuhannya tinggi.

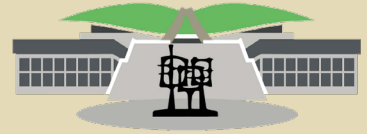
“Saya berpesan persoalan seperti ini harus digaungkan dan kita bicarakan. Pasalnya, jika berbicara nyawa pasien itu bukan hal yang main-main, maka dari itu dibutuhkan proses administrasi yang cepat dan pelayanan yang ramah,” sambung politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Agung mengatakan bahwa kehadiran BURT ditujukan untuk mengetahui kesiapan Rumah Sakit Umum Medimas dalam melayani pasien, khususnya peserta Jamkestama, serta program kemitraan antara Jasindo dengan pihak Rumah Sakit Umum Medimas sebagai Rumah Sakit provider.

Meskipun baru bekerjasama dengan PT Jasindo, Agung berharap RS Medimas memberikan pelayanan maksimal kepada pasien Jamkestama. “Kita juga tidak berharap banyak, karena rumah sakit ini baru tipe C. Namun dari pemaparan manajemen rumah sakit akan meningkatkan kelasnya, hal ini bagus untuk menjadi rujukan sebagai rumah sakit provider PT Asuransi,” pungkasnya. ■ man/es



Foto bersama Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Ketua Agung Budi Santoso dengan manajemen RS Medimas Cirebon dan perwakilan PT Jasindo. Foto: Andri/jk



Pimpinan DPR RI menerima Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 dari Pimpinan BPK RI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6). Foto: Tim/nvl



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana didampingi Sekjen DPR Indra Iskandar menghadiri acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Tangerang, Banten, Jumat (18/6). Foto: Jaka



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan FGD bertajuk "Evaluasi PC PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" di Jakarta, Senin (14/6). Foto: Husen